



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KETAHANAN PANGAN**

RENCANA KERJA TAHUN 2024

<https://ketapang.bone.go.id>

email : ketahananpangankabupatenbone@gmail.com

Jalan Jend. Sudirman No.41 Watampone



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 yang terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta memberi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024, maka diperlukan Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) disempurnakan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1926);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 81);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone

- Nomor 17 Tahun 2019 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 41);
20. Peraturan Bupati Bone Nomor 72 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 74);
21. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 41);
22. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 41).
23. Peraturan Bupati Bone Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 59).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan wilayah pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

6. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilhan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Tahun 2024-2026.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk priode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama 1 (satu) tahun, dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, dan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahunberjalan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan maksud:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

BAB III SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
Bab V : Penutup.

- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:

Lampiran I	: Dinas Pendidikan
Lampiran II	: Dinas Kesehatan
Lampiran III	: BLUD RSUD Tenriawaru
Lampiran IV	: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Lampiran V	: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
Lampiran VI	: Satuan Polisi Pamong Praja
Lampiran VII	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Lampiran VIII	: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Lampiran IX	: Dinas Sosial
Lampiran X	: Dinas Ketenagakerjaan
Lampiran XI	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lampiran XII	: Dinas Ketahanan Pangan
Lampiran XIII	: Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran XIV	: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Lampiran XV	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Lampiran XVI	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lampiran XVII	: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lampiran XVIII	: Dinas Perhubungan
Lampiran XIX	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Lampiran XX	: Dinas Koperasi
Lampiran XXI	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
Lampiran XXII	: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Lampiran XXIII	: Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran XXIV	: Dinas Kebudayaan
Lampiran XXV	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXVI	: Dinas Pariwisata
Lampiran XXVII	: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Lampiran XXVIII	: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Lampiran XXIX	: Dinas Perindustrian
Lampiran XXX	: Dinas Perdagangan
Lampiran XXXI	: Dinas Perikanan
Lampiran XXXII	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampiran XXXIII	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran XXXIV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran XXXV	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran XXXVI	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran XXXVII	: Inspektorat Daerah
Lampiran XXXVIII	: Sekretariat DPRD
Lampiran XXXIX	: Sekretariat Daerah
Lampiran XL	: Kecamatan Lamuru
Lampiran XLI	: Kecamatan Dua Boccoe
Lampiran XLII	: Kecamatan Sibulue
Lampiran XLIII	: Kecamatan Barebbo
Lampiran XLIV	: Kecamatan Cina
Lampiran XLV	: Kecamatan Mare
Lampiran XLVI	: Kecamatan Awangpone
Lampiran XLVII	: Kecamatan Tellu Siattinge
Lampiran XLVIII	: Kecamatan Cenrana
Lampiran XLIX	: Kecamatan Ajangale
Lampiran L	: Kecamatan Amali
Lampiran LI	: Kecamatan Palakka
Lampiran LII	: Kecamatan Ulaweng
Lampiran LIII	: Kecamatan Bengo
Lampiran LIV	: Kecamatan Tellu Limpoe
Lampiran LV	: Kecamatan Lappariaja
Lampiran LVI	: Kecamatan Patimpeng
Lampiran LVII	: Kecamatan Ponre
Lampiran LVIII	: Kecamatan Libureng
Lampiran LIX	: Kecamatan Bontocani
Lampiran LX	: Kecamatan Kahu
Lampiran LXI	: Kecamatan Kajuara
Lampiran LXII	: Kecamatan Tonra
Lampiran LXIII	: Kecamatan Salomekko
Lampiran LXIV	: Kecamatan Tanete Riattang
Lampiran LXV	: Kecamatan Tanete Riattang Barat
Lampiran LXVI	: Kecamatan Tanete Riattang Timur

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024, Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagai rujukan penyusunan program dan kegiatan.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6

Bappeda menelaah kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan RKPD Tahun 2024.

Pasal 7

Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 20 Juli 2023

BUPATI BONE,



A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 20 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,



ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023 NOMOR 71

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Ketahanan Pangan yang merupakan amanah dari Bapak Pj. Bupati Bone dan seluruh masyarakat Kabupaten Bone, maka sudah menjadi kewajiban dan kebutuhan bagi Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bone untuk menyusun perencanaan kinerjanya setiap tahun dalam bentuk dokumen Rencana Kerja (Renja) atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai salah satu dokumen perencanaan kinerja dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance & clean government*). RKT ini juga merupakan bentuk tanggung jawab formal Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bone atas seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya guna memberikan arah bagi pencapaian sasaran strategis berdasarkan visi, misi, dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bone Tahun 2024-2026.

Rencana Kerja Tahun 2024 ini memuat perencanaan strategi dan kebijakan pencapaian target kinerja tahun 2024 berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap realisasi pencapaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan organisasi pada tahun sebelumnya yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bone Tahun 2024-2026.

Rencana Kinerja Tahunan ini mempunyai dua fungsi utama, yaitu :

Pertama, sebagai sarana bagi Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bone untuk memenuhi kewajiban penyampaian Rencana Kinerja Tahunan kepada Bupati Bone.

Kedua, sebagai sarana pengukuran mandiri (*self measurement*) atas realisasi pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bone.

Dengan demikian, kami berharap Rencana Kerja Tahun 2024 ini menjadi media perencanaan kinerja yang lebih bermanfaat dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi pada Tahun 2024 guna mendorong peningkatan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bone.

Watampone, 18 Juli 2023

**Kepala Dinas Ketahanan
Pangan,**



Ir. MUHAMMAD ANGKASA, M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19671223 199303 1 002

DAFTAR ISI

	Halama n
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. . HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan	24
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan	28
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	29
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	46
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETAHANAN PANGAN ...	47
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	47
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahana Pangan	48
3.3. Program dan Kegiatan	50
BAB IV. .. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN	51
4.1. Gambaran Umum Alokasi Anggaran Perangkat Daerah	51

4.2. Program dan Kegiatan serta Pendanaan Rencana
Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju
Tahun 2024 51

BAB V. PENUTUP 71

LAMPIRAN 72

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Bagan Alur Hubungan Perencanaan dan Penganggaran.....	3
Tabel 2.1. Sasaran, Kebijakan dan Program Dinas Ketahanan Pangan	7
Tabel 2.1.1. .. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pencapaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan s/d Tahun 2021 Kabupaten Bone.....	9
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone.....	27
Tabel 2.4.Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pencapaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan s/d Tahun 2021 Kabupaten Bone	31
Tabel 2.5.... Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone.....	46
Tabel 3.2.1.. Keselarasan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone..	48
Tabel 4.2.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone.....	53

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terintegrasi secara nasional untuk pencapaian tujuan dan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pencapaian tujuan dan cita-cita nasional bangsa dan negara Indonesia dijabarkan secara bertahap melalui perencanaan pembangunan nasional dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disinergikan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di tiap daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah masing-masing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penduduk Indonesia sebagian besar masih bermukim di pedesaan. Pada umumnya mereka masih bekerja di sektor pertanian sebagai petani. Oleh karena itu, apabila berbicara pembangunan pertanian maka akan terkait dengan pembangunan pedesaan. Menurut Mosher (1965), menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan pertanian selalu identik dengan pembangunan pedesaan. Pendapat ini dilandasi oleh alasan bahwa kebijaksanaan pembangunan pertanian harus berorientasi pada kebijaksanaan yang berbasis mikro (farm). Pada tahap ini, untuk mencapai kapasitas ekonomi yang lebih kuat maka yang perlu diperhatikan adalah upaya peningkatan produksi dan produktivitas dalam rangka peningkatan peran serta petani sebagai pelaku pembangunan.

Sehubungan dengan itu, dalam memasuki era desentralisasi dan globalisasi pengertian pembangunan pertanian juga mengalami pergeseran. Pembangunan pertanian bukan hanya dipandang dari sisi mikro saja, tetapi pembangunan pertanian seharusnya bersifat holistik, yang menyangkut berbagai dimensi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dalam pengertian makro, pembangunan pertanian meliputi upaya terciptanya transformasi struktural (keserasian antarsektor) sehingga tingkat pertumbuhan (*growth*) akan berjalan secara terjamin dimana para pelakunya secara individual maupun kelompok mampu tumbuh dan berkembang secara terus menerus atas kekuatan sendiri (pembangunan pertanian yang tangguh). Untuk menciptakan pertanian yang tangguh maka aspek yang perlu diperhatikan adalah aspek teknologi dan produksi; aspek bisnis dan industri; aspek manusia (petani); aspek alam / biologi dan aspek pengelolaan dan manajemen.

Berkaitan dengan era desentralisasi, sejak diberlakukannya Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, peran pemerintah telah berubah dari *pelaksana* menjadi *fasilitator*, *akselerator* dan *regulator* program pembangunan. Untuk mendukung proses perubahan tersebut maka yang dapat dilakukan pemerintah antara lain: (1). Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kebutuhan publik; (2). Memfasilitasi dalam rangka penetapan akselerasi pembangunan di wilayah; (3). Memfasilitasi bagi terciptanya iklim yang kondusif bagi kegiatan ekonomi masyarakat; dan (4). Penerapan berbagai pola pemberdayaan masyarakat pelaku bisnis.

Menyikapi hal tersebut diatas, upaya Pemerintah Kabupaten Bone dalam menciptakan

pertanian yang tangguh dituangkan dalam berbagai program, diantaranya Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengembangan Agribisnis. Program Peningkatan Ketahanan Pangan dimaksud untuk mengoperasionalkan kebijakan peningkatan ketahanan pangan yang menyangkut ketersediaan distribusi, aksesibilitas dan stabilitas pengadaannya, disamping aspek produksi, distribusi, keamanan dan gizi serta penganeekaragaman bahan pangan. Sedangkan untuk program pengembangan agribisnis adalah mendorong berkembangnya usaha pertanian dengan wawasan bisnis yang mampu menghasilkan produk pertanian dan industri pertanian primer yang bersaing dan menghasilkan nilai tambah bagi peningkatan pendapatan yang dapat menampung tenaga kerja pertanian, pengembangan ekonomi wilayah, meningkatkan pendapatan para petani dan produsen serta mendukung pertumbuhan pendapatan daerah.

Untuk Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Penyelenggaraan urusan pangan diIndonesia diatur melalui Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 pengganti Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996, yang dibangun berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan. Hal ini menggambarkan bahwa apabila suatu Negara tidak mandiri dalam pemenuhan pangan, maka kedaulatan negara bisa terancam. Dalam Undang-Undang pangan ini menekankan pada pemenuhan kebutuhan pangan ditingkat perorangan, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara optimal.

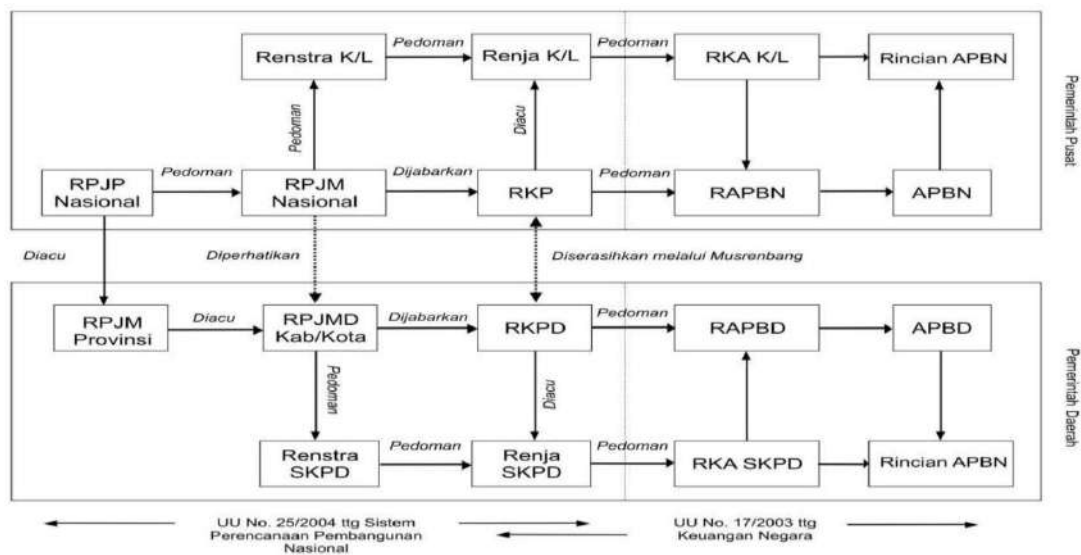
Penerapan program peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Bone dilakukan dalam berbagai kegiatan baik yang dibiayai oleh APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN. Kegiatan tersebut meliputi ketersediaan produksi pangan, distribusi maupun keamanan pangan dan gizi serta

penganekaragaman bahan pangan yang mengacu pada keterkaitan / keterpaduan serta sinergitas antar sektor.

Proses penyusunan dokumen Rencana Kerja ini melalui koordinasi antar instansi Pemerintah Kab. Bone dan partisipasi seluruh stakeholder yang terkait melalui suatu forum yang dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang yang kemudian ditindaklanjuti perencanaannya dalam forum SKPD yang terbagi menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing SKPD.

Pelaksanaan RPJMD Tahun 2024-2026 setiap tahun dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten. Selanjutnya SKPD dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) SKPD. Gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini :

Gambar 1. Bagan Alur Hubungan Perencanaan Dan Penganggaran



1.2.Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Tahun 2024 ini, didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2021);
22. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;
23. Peraturan Bupati Bone Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Bone Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 108 Tahun 2021);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Tahun 2024-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Bone Tahun 2024. Sebagai dokumen perencanaan kinerja tahunan, Renja ini memuat strategi dan

kebijakan beserta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone.

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2024 guna mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bone sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024-2026.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Tahun 2024 sebagai bagian dari Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bertujuan sebagai berikut;

1. Menjadi acuan dasar dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone pada Tahun 2024.
2. Menetapkan target capaian kinerja beserta pagu indikatif program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone sebagai acuan pengukuran realisasi capaian kinerja pada tahun 2024.
3. Menyelaraskan rencana program dan kegiatan prioritas serta Pagu Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone dengan program dan kegiatan Pemerintah Kab. Bone yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penyusunan

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan memuat rumusan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Tahun 2024.

Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Lalu menyajikan evaluasi pelaksanaan renja dan capaian Restra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone tahun lalu, analisis kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, isu strategis terkait tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan menyajikan telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan serta program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan memuat rumusan tentang Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 disertai dengan penyajian dana indikatif, lokasi, target serta prakiraan maju tahun berikutnya.

Bab V Penutup menyajikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut atas Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone pada Tahun 2024.

**BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2022**

Evaluasi terhadap capaian rencana kerja tahun lalu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pencapaian target kinerja sasaran strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bone pada tahun sebelumnya, untuk selanjutnya dinilai hasil capaian kinerjanya dan dipelajari hambatan dan kendala yang ada guna perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi pada tahun-tahun berikutnya.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan

Guna pencapaian indikator sasaran strategis, pada tahun 2022 ditunjang dengan pelaksanaan program-program yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan sebagai berikut :

Tabel 2.1.1.
Sasaran, Kebijakan dan Program Dinas Ketahanan Pangan

Sasaran	Kebijakan	Program
<ul style="list-style-type: none">▪ Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama yang Terjangkau Bagi Masyarakat▪ Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Berkualitas (B2SA)	Pengembangan ketahanan pangan	<ul style="list-style-type: none">▪ Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan▪ Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat▪ Program

	Penanganan Kerawanan Pangan ■ Program Pengawasan Keamanan Pangan
--	--

Sumber Data : Renstra Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Bone Tahun 2024-2026

Program Peningkatan Ketahanan Pangan bertujuan untuk memfasilitasi upaya peningkatan koordinasi manajemen pembangunan ketahanan pangan. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bermutu, bergizi dan aman. Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan meliputi : (1) Pemantapan koordinasi ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh lintas sektor dan lintas wilayah; (2) Penyelenggaraan manajemen program dan kegiatan ketahanan pangan; (3) Penyediaan belanja pegawai, barang dan jasa penyelenggaraan koordinasi ketahanan pangan; (4) Penyediaan anggaran untuk operasional satuan kerja dalam rangka mendukung pencapaian rencana kerja; (5) Terjaminnya ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat; (6) Mantapnya distribusi pangan antar wilayah dan antar waktu; (7) Berkembangnya diversifikasi produksi dan konsumsi pangan; (8) Meningkatnya kemandirian pangan masyarakat; serta (9) Meningkatnya kesadaran aparat, petani, dan swasta dalam peningkatan ketahanan pangan.

Kegiatan pokok tersebut difokuskan pada upaya; (1) meningkatnya kapasitas kelembagaan ketahanan pangan; (2) peningkatan peran daerah dalam pengendalian dan stabilitas harga; (3) percepatan diversifikasi/ penganekaragaman konsumsi pangan; (4) penanganan daerah rawan pangan; serta (5) pemantauan dan analisis.

Dalam pencapaian kinerja pada urusan pangan, Dinas Ketahanan Pangan ditunjang dengan Anggaran Pokok sebesar Rp.13.302.716.700,- dan melaksanakan Perubahan Anggaran sebesar Rp.13.555.019.864,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1.2.
Program Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022

Program	Jumlah		Persentase (%)	Sisa Anggaran (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.515.059.614	3.409.704.252	97	105.355.362
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	8.421.580.000	8.412.552.600	99,89	9.027.400
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.547.600.250	1.517.671.669	98,07	29.928.581
Program Penanganan Kerawanan Pangan	30.990.000	30.950.000	99,87	40.000
Program Pengawasan Keamanan Pangan	39.790.000	39.290.000	98,74	98,98
Total	13.555.019.864	13.410.168.521	98,93	144.851.343

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone hingga Tahun 2022 berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2022 dan proyeksi capaian kinerja tahun 2023 secara umum dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Ketahanan Pangan) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2		Urusan Wajib								
2 09		Bidang Urusan Pangan								
2 09 01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (Minimal 76%)	100	100	100	100	100	100	100
2 09 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pengurus Daerah	100	100	100	100	100	100	100
2 09 01 2.01 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	7	6	100	6	19	380
2 09 01 2.01 02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	0	0	0	0	0	0
2 09 01 2.01 04		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	0	0	0	0	0	0
2 09 01 2.01 06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	0	0	0	0	0	0
2 09 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Periodik Perangkat Daerah yang	100	100	100	100	100	100	100
2 09 01 2.02 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	14	28	89	28	25	96
2 09 01 2.02 03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	0	0	0	0	0	0
2 09 01 2.02 04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	19	0	0	0	0	0
2 09 01 2.02 05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	0	0	0	0	0	0
2 09 01 2.02 03		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan I Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan I Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD SKPD	0	0	0	0	0	0	0
2 09 01 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100
2 09 01 2.05 01		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	0	0	0	0	0	0
2 09 01 2.05 03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	19	0	0	0	0	0	0
2 09 01 2.05 02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	28	28	28	100	0	28	100
2 09 01 2.05 09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	1	1	100	1	3	300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Ketahanan Pangan) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
209012.0511	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	10	0	0	0	0	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Ketahanan Pangan) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 09 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum Dinas Ketahanan Pangan	100	100	100	100	100	100	100	100
2 09 01 2.06 01	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12	0	0	0	0	0	0	0
2 09 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	36	300
2 09 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	36	300
2 09 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	36	300
2 09 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	36	300
2 09 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	15	12	12	12	100	13	37	247
2 09 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	0	0	0	0	0	0	0
2 09 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160	160	160	160	100	160	480	300
2 09 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0
2 09 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan	100	100	100	100	100	100	100	100
2 09 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	0	0	0	0	0	0	0
2 09 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	0	0	0	0	0	0	0
2 09 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	5	4	4	100	7	16	320
2 09 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Dinas Ketahanan Pangan	100	100	100	100	100	100	100	100
2 09 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	36	72	72	100	36	144	600
2 09 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	36	300
2 09 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas Ketahanan Pangan yang terpelihara	100	100	100	100	100	100	100	100
2 09 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17	12	15	15	100	1	28	165

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Ketahanan Pangan) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 09 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2	0	0	0	0	0	0	0
2 09 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	0	2	2	100	1	3	75
2 09 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	3	1	1	1	100	1	1	33
2 09 02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/Jagung Sesuai Kebutuhan)	776	4	10	10	100	0	14	2
2 09 02 2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan	Jumlah Infrastruktur Kemandirian Pangan yang Diadakan	2	4	10	10	100	0	14	700
2 09 02 2.01 01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	0	2	8	8	100	8	18	0
2 09 02 2.01 02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0
2 09 02 2.01 03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	2	4	3	3	100	0	7	350
2 09 02 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	0	36	36	36	100	36	108	0
2 09 02 2.01 05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	0	0	0	0	0	0	0	0
2 09 03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.Tingkat Stabilitas Harga Pangan Utama Bagi Masyarakat	9.5	0	0	0	0	0	0	0
		2. Angka Kecukupan energi	2100	0	0	0	0	0	0	0
		3. Angka Kecukupan Protein	57.15	0	0	0	0	0	0	0
2 09 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan	Jumlah dokumen ketersediaan informasi penyediaan pangan pokok dan pangan lainnya	1	100	1	1	100	100	201	20100
2 09 03 2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	0	1	1	1	100	1	3	0
2 09 03 2.01 02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0
2 09 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	34	36	36	36	100	36	108	318
2 09 03 2.01 04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	0	12	12	12	100	12	36	0
2 09 03 2.01 05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	0	34	18	18	100	18	70	0
2 09 03 2.01 06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	34	18	34	34	100	34	86	253

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Ketahanan Pangan) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 09 03 2.0107	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	30	0	0	0	0	0	0	0
2 09 03 2.0108	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	12	0	0	0	0	0	0	0
2 09 03 2.0111	Pemantauan Stok Pangan	Informasi stok pangan	1	0	0	0	0	0	0	0
2 09 03 2.0112	Penyediaan informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah kabupaten/kota	informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah kabupaten/kota	12	0	0	0	0	0	0	0
2 09 03 2.0113	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0	0	0	0
2 09 03 2.0114	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok, pasokan dan harga pangan pokok strategis	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok, pasokan dan harga pangan pokok strategis	12	0	0	0	0	0	0	0
2 09 03 2.0115	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	1	0	0	0	0	0	0	0
2 09 03 2.0116	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1	0	0	0	0	0	0	0
2 09 03 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan kabupaten yang tersedia	5	2.4	100	80	80	1	4	80
2 09 03 2.0201	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	0	36	0	0	0	0	36	0
2 09 03 2.0202	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1	0	0	0	0	0	0	0
2 09 03 2.0203	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	5	0	3.3	3.2	96.97	1	4	84
2 09 03 2.0204	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	0	1	3.3	3.2	96.97	0	4	0
2 09 03 2.0205	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	5	0	0	0	0	0	0	0
2 09 03 2.0206	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	5	1	3.3	3.2	96.97	0	4	84
2 09 03 2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Jumlah regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	1	1	1	1	100	1	1	100
2 09 03 2.0301	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	12	36	36	36	100	36	108	900
2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan	Jumlah Dokumen Konsumsi Pangan per kapita/tahun	1	1	1	1	100	1	3	300
2 09 03 2.0401	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1	1	1	1	100	1	3	300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Ketahanan Pangan) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	9	40	40	40	100	40	120	1333
2 09 03 2.04 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	36	36	36	36	100	36	108	300
2 09 04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah rawan pangan yang di tangani	95	70	80	80	100	98	248	261
2 09 04 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah dokumen analisis penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan	1	1	12	12	100	1	14	1400
2 09 04 2.01 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1	1	12	12	100	1	14	1400
2 09 04 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan pada daerah rawan pangan	20	0	70	70	100	1	71	355
2 09 04 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	0	36	36	36	100	36	108	0
2 09 04 2.02 02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	0	10	10	100	1	11	1100
2 09 04 2.02 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi kab/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi kab/Kota	12	0	0	0	0	0	0	0
2 09 04 2.02 04	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan gizi	1	0	0	0	0	0	0	0
2 09 04 2.02 05	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0	0	0	0
2 09 05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Ketersediaan pangan yang aman dikonsumsi oleh masyarakat	100	2	100	100	100	2	104	104
2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pengawasan Keamanan Pangan Segar	1	2	100	100	100	2	104	10400
2 09 05 2.01 01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	0	12	12	12	100	12	36	0
2 09 05 2.01 02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0	12	12	12	100	12	36	0
2 09 05 2.01 03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0	12	12	12	100	12	36	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Ketahanan Pangan) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	09	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0	1	1	1	3
2	09	05	2.01	06	Rekomendasi perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1	0	0	0	0
2	09	05	2.01	07	Penyediaan sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar kab/kota	1	0	0	0	0
2	09	05	2.01	08	Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	12	1	1	1	3
09	05	2.01	09	09	Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	1	0	0	0	0

Berdasarkan realisasi hasil program (outcome) dan keluaran kegiatan (output) kegiatan yang tersaji pada tabel 2.1.3. di atas, terlihat bahwa dari 5 program dan 15 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bone pada Tahun 2022, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Terdapat 5 program dan 15 kegiatan yang memenuhi target kinerja dengan realisasi capaian kinerja mencapai 100% dan diproyeksikan akan mendorong tercapainya target kinerja program pada tahun 2023 sesuai dengan Renstra Dinas Ketahanan Pangan tahun 2018-2023.

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian target outcome dan output dari program/kegiatan tersebut antara lain :

- komitmen dan kerjasama dari seluruh jajaran aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bone dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut sesuai dengan perencanaan.
 - Adanya dukungan dana yang cukup memadai.
- b. Terdapat 1 indikator output dari 1 kegiatan dan 1 indikator sub output dari 1 sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang telah direncanakan yaitu :

- Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan indikator sub output tersedianya cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota.

Belum tercapainya target kinerja indikator output ini disebabkan oleh adanya aturan yang menetapkan kenaikan harga beras, sehingga pengadaan cadangan pangan tersebut tidak dapat direalisasikan sesuai target.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dalam pelaksanaan Tugasnya dititikberatkan pada pelayanan ketahanan pangan masyarakat. Ketahanan Pangan merupakan unsur terpenting dari ketahanan Nasional di bidang ekonomi dan menjadi fokus pembangunan nasional. Perwujudan ketahanan pangan dapat dicapai melalui 4 pilar yaitu : (1) Ketersediaan pangan (Produksi dan Impor) dan Cadangan Pangan; (2) Distribusi Pangan; (3) Penganekaragaman konsumsi pangan; dan (4) Keamanan Pangan. Ketersediaan pangan wilayah merupakan prasyarat terwujudnya ketahanan pangan penduduk yang berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya.

Pelayanan dasar yang menjadi tupoksi urusan pangan yaitu dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketahanan pangan. Maksud ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketahanan pangan adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Bone yang membidangi pelayanan urusan wajib ketahanan pangan dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang secara teknis dilaksanakan di Kabupaten Bone sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam mewujudkan ketahanan pangan pada dasarnya terkait dengan adanya pertumbuhan permintaan pangan yang lebih cepat dari pertumbuhan penyediaanya. Permintaan pangan meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat, serta perkembangan selera. Dinamika sisi permintaan ini menyebabkan kebutuhan pangan di Kabupaten Bone

meningkat dengan cepat, baik dalam jumlah, mutu dan keragamannya.

Pada tingkat rumah tangga, persoalan yang menonjol dalam pemantapan ketahanan pangan adalah masih adanya kelompok masyarakat yang mempunyai daya beli rendah (miskin secara ekonomi), ataupun yang tidak mempunyai akses atas pangan karena berbagai sebab. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin Kabupaten Bone akan kehilangan potensi dari sebagian sumber daya manusianya karena kualitasnya menurun.

Bila tidak diantisipasi secara dini, rawan pangan bisa saja terjadi terutama di pedesaan, yang menggantungkan sebagian besar hidupnya dari sektor pertanian. Sesuai dengan keadaan tersebut, maka strategi perwujudan ketahanan pangan yang perlu dilaksanakan adalah : (a) membangun ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan; dan (b) menggerakkan tanggung jawab seluruh komponen pemangku kepentingan (pemerintah dan masyarakat/swasta) untuk melaksanakan kewajiban dalam memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan kemiskinan rawan pangan.

Pada sisi lain, Kabupaten Bone mempunyai keunggulan komparatif (komparative advantage) sebagai daerah pertanian. Keunggulan komparatif tersebut merupakan fundamental perekonomian yang perlu didayagunakan melalui pembangunan ekonomi sehingga menjadi keunggulan bersaing (competitive advantage) dengan begitu perekonomian yang dikembangkan di Kabupaten Bone memiliki landasan yang kokoh pada sumber daya domestik, memiliki kemampuan bersaing dan berdaya guna bagi seluruh rakyat Kabupaten Bone.

Memperhatikan cakupan permasalahan tersebut di atas, kebijakan pembangunan ketahanan pangan di

Kabupaten Bone diarahkan guna memperkuat seluruh subsistem dalam sistem ketahanan pangan yang meliputi; subsistem ketersediaan, subsistem distribusi dan konsumsi pangan.

Pada sistem ketersediaan, kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Bone diarahkan untuk (a) menjamin ketersediaan pangan; (b) mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan masyarakat; dan (c) meningkatkan kapasitas produksi melalui optimalisasi pemanfaatan lahan untuk produksi pangan. Pada aspek distribusi, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk :

- (a) Meningkatkan sarana dan prasarana distribusi pangan, sehingga efisiensi perdagangan dapat ditingkatkan, termasuk di dalamnya mengurangi kerusakan bahan pangan akibat distribusi yang tidak efisien;
- (b) Mengembangkan kelembagaan pengolahan dan pemasaran di pedesaan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi pangan serta percepatan nilai tambah.

Dalam hal konsumsi, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk :

- (a) Menjamin pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan bagi setiap rumah tangga dalam jumlah dan mutu yang memadai, aman dikonsumsi dan bergizi seimbang;
- (b) Semakin meningkatnya efisiensi dan efektivitas intervensi bantuan pangan bersubsidi kepada golongan masyarakat tertentu (golongan miskin, gizi buruk dsb).

Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2. (Tabel T-C.30)
 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Dinas Ketahanan Pangan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	-	-	B	B	BB	A	BB	BB	BB	A	Sesuai target
2	Ketersediaan pangan utama	-	IKK	100	100	100	90	605,734	765,83	343,96	340	Melampaui Target
3	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) Konsumsi	SDGs	-	89	89,5	90	95	97	94,1	94,9	95	Melampaui target

Sumber Data : Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Tahun 2024-2026

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya sangat signifikan bagi Dinas Ketahanan Pangan.

Ada beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi urusan pangan yaitu sebagai berikut :

1. Ketersediaan dan Distribusi Pangan

- a. Produksi dan kapasitas produksi pangan cenderung terbatas.
- b. Jumlah permintaan pangan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk.
- c. Pengelolaan kelembagaan cadangan pangan masyarakat belum berkembang secara optimal.
- d. Belum adanya cadangan pemerintah kabupaten.

2. Penganekaragaman Bahan Pangan

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat masih rendah, yang dicirikan pada pola konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi, seimbang dan aman.

3. Keamanan Pangan dan Gizi

- a. Kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat produsen dan konsumen terhadap pentingnya keamanan pangan, terutama pada produk pangan segar dan olahan.
- b. Pengelolaan warung/kantin sekolah belum menerapkan kaidah-kaidah/standar keamanan pangan khususnya sanitasi lingkungan kantin dan higienitas makanan yang dijual.
- c. Belum optimalnya kontrol pestisida, bahan kimia dan bahan tambahan pengawet.
- d. Koordinasi lintas sektor terkait dengan keamanan pangan belum optimal.

e. Masih tingginya kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan impor.

Upaya dalam pemecahan masalah sebagaimana tersebut di atas, antara lain :

1. Intensifikasi sosialisasi, koordinasi, penganeekaragaman konsumsi pangan (P2KP) kepada masyarakat, kelompok dan aparatur.
2. Melaksanakan bimbingan teknis percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan bagi masyarakat dan kelompok wanita tani binaan Dinas Ketahanan Pangan.
3. Mensosialisasikan kepada masyarakat untuk pemanfaatan pekarangan dan bekerjasama dengan tim penggerak PKK Kabupaten Bone.
4. Melaksanakan pemantauan ketersediaan dan stabilitas harga menjelang hari raya keagamaan.
5. Melaksanakan sosialisasi, koordinasi dan apresiasi pengawasan, pembinaan kepada pelaku usaha pertanian dan aparatur.
6. Koordinasi intensif dengan SKPD yang terkait dengan aspek-aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan kerangka pendahuluan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang berhasil di himpun dari masyarakat, stakeholder dan pemerintah sendiri. Rancangan awal RKPD merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh proses penyusunan RKPD. Rancangan awal menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap perangkat

daerah untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyiapkan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan awal RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan dan tahun yang akan datang.

Hal hal yang menjadi catatan penting dalam proses review ini, mencakup rumusan program/kegiatan, lokasi, indikator kinerja (outcome/output) beserta targetnya, dan juga kebutuhan dana/pagu indikatif untuk pelaksanaannya. Perbedaan-perbedaan ditemukan (terkait hal-hal di atas) dalam proses ini harus dijelaskan untuk hasil perencanaan yang lebih baik, berorientasi pada pencapaian hasil yang terukur dan tepat sasaran.

Rancangan awal RKPD disusun melalui 2 tahapan, yaitu proses inventaris indikator Renja Perangkat Daerah, berupa sub-sub kegiatan yang berupa top down berasal dari himpunan kebutuhan program kegiatan dan bottom up melalui mekanisme musrenbang. Selanjutnya berdasarkan analisis kebutuhan yang mempertimbangkan kinerja pencapaian target tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dan dari hasil evaluasi kegiatan yang ada dengan melihat isu strategis tantangan dan hambatan.

Untuk memfasilitasi kebutuhan tersebut diakomodasi dalam urusan wajib Ketahanan Pangan sedangkan untuk menunjang pelaksanaan urusan pilihan difasilitasi dengan program kegiatan yang menjadi prioritas pada urusan wajib setiap SKPD.

Sebagai upaya capaian indikator kinerja, maka program/kegiatan yang menjadi prioritas pada tahun 2024 diantaranya adalah :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sikap wanita tani dan anggota dalam mengkonsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman.
2. Tersedianya peta rawan pangan sebagai data base Kabupaten Bone.
3. Tersedianya data harga pasar setiap minggunya.
4. Tersosialisasinya keamanan pangan segar mutu bagi aparaturnya dan pelaku usaha pertanian.
5. Meningkatnya informasi keamanan pangan bagi masyarakat baik pelaku maupun konsumen.
6. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan para pengurus lumbung pangan masyarakat tentang tata cara pengelolaan lumbung pangan masyarakat.
7. Tumbuhnya lembaga usaha pangan masyarakat sehingga dapat mengatasi harga pangan yang bergejolak.
8. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta dan kelompok afinitas pengurus lembaga keuangan desa melalui pemberdayaan anggota kelompok desa mandiri pangan.
9. Meningkatkan pengelolaan dan keterampilan anggota kelompok afinitas dalam pelatihan pengolahan pangan.
10. Membangun lumbung pangan desa dan lumbung pangan pemerintah sebagai cadangan pangan masyarakat.

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.4. (Tabel T-C.31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

No .	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang	Persentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (minimal 76%)	100	3,860,497	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Tanete Riattang	Persentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (minimal 76%)	100	3,860,497	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang	Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	100	24,609	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang	Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	100	24,609	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	19,991	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	19,991	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tanete Riattang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4,618	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tanete Riattang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	4,618	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Periodik Perangkat Daerah	100	2,933,398	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Periodik Perangkat Daerah	100	2,933,398	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tanete Riattang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	2,933,398	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tanete Riattang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	2,933,398	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang	Persentase ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100	300,438	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang	Persentase ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100	300,438	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tanete Riattang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	44,976	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tanete Riattang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	44,976	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Tanete Riattang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	8,020	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Tanete Riattang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	8,020	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tanete Riattang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	19,693	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tanete Riattang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	19,693	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Tanete Riattang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	12	1,242	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Tanete Riattang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	12	1,242	

	n		Disediakan			an		Disediakan			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Tanete Riattang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	15	18,500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Tanete Riattang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	15	18,500	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27 Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160	208,007	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27 Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160	208,007	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Tanete Riattang	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	40,099	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Tanete Riattang	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	40,099	

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tanete Riattang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	40,099	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tanete Riattang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	40,099	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tanete Riattang	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan pada Perangkat Daerah	100	346,928	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tanete Riattang	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan pada Perangkat Daerah	100	346,928	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tanete Riattang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	36,018	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tanete Riattang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	36,018	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tanete Riattang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	310,910	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tanete Riattang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	310,910	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tanete Riattang	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik pada Perangkat Daerah	100	215,025	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tanete Riattang	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik pada Perangkat Daerah	100	215,025	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Tanete Riattang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	63,125	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Tanete Riattang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	63,125	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Tanete Riattang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1	151,900	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Tanete Riattang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1	151,900	

II	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	27 Kecamatan	Tingkat Stabilitas Harga Pangan Utama bagi Masyarakat	±9,5	287,855	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	27 Kecamatan	Tingkat Stabilitas Harga Pangan Utama bagi Masyarakat	±9,5	287,855	
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	27 Kecamatan	Jumlah dokumen ketersediaan informasi penyediaan pangan pokok dan pangan lainnya	1	126,699	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	27 Kecamatan	Jumlah dokumen ketersediaan informasi penyediaan pangan pokok dan pangan lainnya	1	126,699	

	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	27 Kecamatan	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	34	56,390	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	27 Kecamatan	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	34	56,390	
	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	27 Kecamatan	Jumlah Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1	10,255	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	27 Kecamatan	Jumlah Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1	10,255	
	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	27 Kecamatan	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1	20,980	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	27 Kecamatan	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1	20,980	
	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	27 Kecamatan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	1	30,214	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	27 Kecamatan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	1	30,214	

	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	27 Kecamatan	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1	8,860	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	27 Kecamatan	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1	8,860	
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	27 Kecamatan	Jumlah Cadangan Pangan Kabupaten yang Tersedia	1	9,990	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	27 Kecamatan	Jumlah Cadangan Pangan Kabupaten yang Tersedia	1	9,990	
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	27 Kecamatan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1	9,990	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	27 Kecamatan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1	9,990	
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	27 Kecamatan	Jumlah Dokumen Konsumsi Pangan per kapita/tahun	1	151,167	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	27 Kecamatan	Jumlah Dokumen Konsumsi Pangan per kapita/tahun	1	151,167	

	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	27 Kecamatan	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1	11,732	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	27 Kecamatan	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1	11,732	
	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	27 Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	9	139,435	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	27 Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	9	139,435	
IV	Program Penanganan Kerawanan Pangan	27 Kecamatan	Persentase Daerah Rawan Pangan di Wilayah Kab/Kota yang Ditangani	95	24,513	Program Penanganan Kerawanan Pangan	27 Kecamatan	Persentase Daerah Rawan Pangan di Wilayah Kab/Kota yang Ditangani	95	24,513	
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	27 Kecamatan	Jumlah dokumen analisis penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan	1	14,593	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	27 Kecamatan	Jumlah dokumen analisis penyusunan peta kerentanan dan ketahanan	1	14,593	

								pangan			
	Penyusunan , Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	27 Kecamatan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1	14,593	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	27 Kecamatan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1	14,593	
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Kecamatan	Jumlah bantuan pada daerah rawan pangan	20	9,920	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Kecamatan	Jumlah bantuan pada daerah rawan pangan	20	9,920	
	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	27 Kecamatan	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1	9,920	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	27 Kecamatan	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1	9,920	

IV	Program Pengawasan Keamanan Pangan	27 Kecamatan	Persentase Ketersediaan Pangan yang Aman dikonsumsi oleh masyarakat	100	60,531	Program Pengawasan Keamanan Pangan	27 Kecamatan	Persentase Ketersediaan Pangan yang Aman dikonsumsi oleh masyarakat	100	60,531	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	27 Kecamatan	Jumlah dokumen pengawasan keamanan pangan segar	2	60,531	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	27 Kecamatan	Jumlah dokumen pengawasan keamanan pangan segar	2	60,531	
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	27 Kecamatan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1	37,371	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	27 Kecamatan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1	37,371	
	Penguatan Kelembagaan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	27 Kecamatan	Jumlah Dokumen Penguatan Kelembagaan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	1	23,160	Penguatan Kelembagaan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	27 Kecamatan	Jumlah Dokumen Penguatan Kelembagaan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	1	23,160	

						Tumbuhan					
Total					4,233,396					4,233,396	

Sumber Data : Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Tahun 2024-2026

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pengusulan program dan kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone dilakukan dengan beberapa model pengusulan, diantaranya menggunakan model top down dan botton up. Usulan dari masyarakat dan pemangku kepentingan tersebut disinkronkan dengan program prioritas daerah terkait dengan pencapaian target Renstra dan RPJMD 2024-2026 yang kemudian diakomodir melalui pokok-pokok pikiran DPRD dan musrenbang.

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5. (Tabel T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
Tahun 2024
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	27 Kecamatan	1. Angka Kecukupan Energi 2. Angka Kecukupan Protein	2100 kkal/kapita/hari 57,15 gr/kapita/hari	
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	27 Kecamatan	Jumlah Dokumen Konsumsi Pangan per kapita/tahun	1 Dokumen	
	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	27 Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	9 Laporan	

Sumber Data : Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone
Tahun 2024-2026

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETAHANAN PANGAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2024 merupakan tahun pertama RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2024-2026, oleh sebab itu arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone hal ini sejalan dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuannya agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan dapat menjabarkan dan mensinkronisasi kebijakan yang telah digariskan secara regional dan nasional.

Secara umum, kebijakan pembangunan pangan yang dicanangkan Pemerintah Pusat mengacu pada 9 agenda prioritas pembangunan nasional (NAWA CITA) dinamakan sektor pangan termasuk dalam agenda : C7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Kebijakan Nasional dalam mendukung ketahanan pangan tertuang dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang pangan selain itu pemerintah telah membuat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan, untuk itu dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional tidak terlepas dengan kebijakan umum pembangunan pertanian dalam mendukung penyediaan pangan terutama dari produksi domestik. Dengan demikian upaya mewujudkan ketahanan pangan dan stabilitasnya (penyediaan dari produksi domestik) identik pula dengan upaya meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional dalam pembangunan pertanian beserta kebijakan pendukung lain terkait.

Strategi umum pembangunan pertanian adalah memajukan agribisnis, yaitu membangun secara sinergis dan harmonis aspek-aspek: (1) industri

hulu pertanian yang meliputi perbenihan, input produksi lainnya dan alat mesin pertanian; (2) pertanian primer (on-farm); (3) industri hilir pertanian (pengolahan hasil); dan (4) jasa-jasa penunjang yang terkait. Mengingat bahwa pelaku utama agribisnis adalah petani dan pengusaha, dan tanpa adanya insentif pendapatan mereka akan enggan menekuni agribisnis, maka kata kunci dalam meningkatkan kinerja sektor ini adalah menciptakan insentif ekonomi yang menunjang daya tarik agribisnis.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan

Tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Ketahanan Pangan merujuk pada arah dan kebijakan RKPD Tahun 2024 yang berpedoman pada arah kebijakan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2024-2026. Guna mencapai indikator sasaran tersebut ditunjang dengan perumusan indikator turunan sebagai berikut :

- Terpenuhinya kecukupan pemenuhan pangan dan gizi masyarakat.
- Makin baiknya pola pangan harapan masyarakat Kabupaten Bone.
- Meningkatnya kemandirian pangan masyarakat.
- Tersedianya pasokan pangan ke seluruh wilayah Kabupaten Bone.
- Berkurangnya daerah rawan pangan/ gizi buruk.

Tabel 3.2.1.

Keselarasan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bone

VISI : Masyarakat Bone yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera
MISI I : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Ketahanan Pangan	Meningkatkan tata kelola dinas Ketahanan Pangan yang dilakukan secara bertahap terkait : - Akuntabilitas dan manajemen Kinerja; - Pengelolaan SDM; - Praktek Profesional; - Dukungan Anggaran dan Sarana Prasarana.	Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik perizinan secara meneyeluruh terkait : - Akuntabilitas dan manajemen Kinerja; - Pengelolaan SDM; - Praktek Profesional; - Dukungan Anggaran dan Sarana Prasarana.
MISI II : Meningkatkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Kedaulatan Pangan Daerah	Meningkatnya ketersediaan dan Cadangan Pangan	Peningkatan Ketersediaan Pangan yang merata antarwaktu dan antar wilayah dan Peningkatan Sistem, jaringan dan kelembagaan distribusi Pangan	Penyediaan Data Ketersediaan Pangan
			Pengembangan Sumber Daya Tanaman Pangan Lokal
			Pemberdayaan Masyarakat pada daerah rawan pangan
			Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat

			Peningkatan Stabilitas harga pangan strategis dan pengembangan kelembagaan Distribusi Pangan.
	Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam	Peningkatan Konsumsi Pangan beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Berbasis Sumber Daya Lokal serta peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Keamanan Pangan pada pelaku usaha dan konsumen dan Peningkatan Mutu Produk Pangan segar asal tumbuhan (PSAT)	Pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan B2SA
			Pengembangan Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
			Promosi Penganekaragaman Pangan
			Pengawasan, Pengembangan Kelembagaan, Peningkatan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan

Sumber Data : Renstra-P Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

3.3. Program dan Kegiatan

- a. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 merupakan program dan kegiatan yang dapat menunjang pencapaian indikator RPJMD Kabupaten Bone. Program dan kegiatan yang disusun disesuaikan dengan potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki Kabupaten Bone dengan memperhatikan

aspirasi masyarakat dan dinamika pembangunan daerah.

- b. Sebagaimana RKPD Tahun 2024 pagu indikatif anggaran Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp.4.233.396.074,- adapun pagu indikatif sektoral tersebut diperuntukkan bagi 2 urusan, yaitu urusan wajib (belanja Rutin) sebesar Rp.3.860.496.894,- dan sisanya Rp.372.899.180,- untuk kebutuhan belanja program prioritas. Berdasarkan RKPD Tahun Anggaran 2024, anggaran tersebut akan dipergunakan untuk membiayai 1 program dan 6 kegiatan pada urusan wajib (belanja rutin) serta 3 program dan 6 kegiatan pada urusan teknis.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN

4.1. Gambaran Umum Alokasi Anggaran Perangkat Daerah

Dalam rangka pelaksanaan tupoksi Dinas Ketahanan Pangan rentang periode tiga tahun (Renstra) berjalan, yaitu tahun 2024-2026, setiap tahunnya telah dialokasikan anggaran program dan kegiatan, dengan nilai sekitar 0,30 - 0,35 % dari total belanja APBD Kab. Bone.

Nilai Pagu Anggaran Belanja Langsung Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bone Tahun 2024 sebagaimana tersaji pada tabel di atas merupakan nilai pagu indikatif berdasarkan hasil analisis kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024, yang diproyeksikan mencapai 0,5% dari estimasi total nilai Belanja Langsung APBD Tahun 2024 nanti, dengan prinsip "*Money Follow Program*", dimana anggaran direncanakan berdasarkan kebutuhan riil pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian hasil yang efektif, efisien, dan ekonomis sesuai dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang ingin dicapai.

4.2. Program & Kegiatan serta Pendanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka pendek dan jangka menengah berdasarkan Rancangan Awal Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bone Periode Tahun 2024-2026 serta hasil kajian terhadap isu-isu strategis penyelenggaraan

tugas dan fungsi perangkat daerah, ditetapkanlah program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja tujuan/sasaran strategis setiap tahunnya.

Disamping untuk mendorong pencapaian visi dan misi pemerintah daerah, dalam perencanaan kinerja tahun 2024, pelaksanaan tugas ketahanan pangan target sasaran pembangunan nasional yang terkait Pencapaian SDGs, Pengentasan Kemiskinan, Pencapaian NSPK dan SPM, dan sebagainya, berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kab. Bone, termasuk Pemerintah Desa. Hal-hal tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bone.

Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bone Tahun 2024, direncanakan terdiri dari 4 Program dan 12 Kegiatan, yang terbagi atas 1 Program rutin dengan 6 Kegiatan dan 3 Program prioritas dengan 6 Kegiatan yang kesemuanya difokuskan pada pencapaian target indikator tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Ketiga program prioritas diarahkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi utama Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bone dalam bentuk pelaksanaan mengacu pada pilar ketahanan pangan yaitu Ketersediaan Pangan, Distribusi Pangan, Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dan Keamanan Pangan dan sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai.

Sementara satu program lainnya merupakan program rutin (generik) terkait pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana prasarana, peningkatan disiplin aparatur, perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja yang diarahkan untuk menunjang kelancaran

pelaksanaan program prioritas Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bone dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Tahun 2024.

Berdasarkan indikator sasaran yang akan dicapai pada tahun 2024, maka ditetapkan pula indikator dan target kinerja program dan kegiatan yang merupakan outcome, output, dan input masing-masing program dan kegiatan yang direncanakan. Ditetapkan pula dana atau anggaran sebagai input program/kegiatan merupakan pagu rencana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bone Tahun 2024 dan proyeksi tahun 2025. Selain itu ditentukan juga lokasi dan sumber dana dalam pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bone.

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2.1. (Tabel T-C.33)
PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS
KETAHANAN PANGAN KAB. BONE
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KETAHANAN PANGAN						4.851.654.864,00							5.336.820.350,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.851.654.864,00							5.336.820.350,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						4.851.654.864,00							5.336.820.350,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (minimal 76%)	100 %			100 %	4.066.321.574,00						100 %	4.472.953.731,00	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah	100 Persen 100 Persen			100 Persen	35.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Dinas Ketahanan Pangan	100 Persen 100 Persen	38.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen			5 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Bone, Tanete Riattang, Biru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Dinas Ketahanan Pangan	5 Dokumen	22.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan			4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Dinas Ketahanan Pangan	4 Laporan	16.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Periodik Perangkat Daerah	100 Persen 100 Persen			100 Persen	3.006.654.864,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Pelayanan Administrasi Keuangan Dinas Ketahanan Pangan	100 Persen 100 Persen	3.307.320.350,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan			364 Orang/bulan	3.006.654.864,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Pelayanan Administrasi Keuangan Dinas Ketahanan Pangan	26 Orang/bulan	3.307.320.350,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah</i>	100 Persen 100 Persen			100 Persen	35.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Pelayanan Administrasi Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan	100 Persen 100 Persen	38.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	3 Orang			1 Orang	25.000.000,00	Kab. Bone, Tanete Riattang, Biru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Pelayanan Administrasi Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan	1 Orang	27.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	30 Orang			2 Orang	10.000.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Pelayanan Administrasi Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan	10 Orang	11.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah</i>	100 Persen 100 Persen			100 Persen	347.113.810,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Pelayanan Administrasi Umum Dinas Ketahanan Pangan	100 Persen 100 Persen	381.825.191,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	36 Paket			12 Paket	47.444.500,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Pelayanan Administrasi Umum Dinas Ketahanan Pangan	12 Paket	52.188.950,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	36 Paket			12 Paket	8.023.300,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Pelayanan Administrasi Umum Dinas Ketahanan Pangan	12 Paket	8.825.630,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	36 Paket			12 Paket	20.646.010,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Pelayanan Administrasi Umum Dinas Ketahanan Pangan	12 Paket	22.710.611,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	36 Paket			12 Paket	1.500.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Pelayanan Administrasi Umum Dinas Ketahanan Pangan	12 Paket	1.650.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	45 Dokumen			15 Dokumen	19.500.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Pelayanan Administrasi Umum Dinas Ketahanan Pangan	15 Dokumen	21.450.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	480 Laporan			160 Laporan	250.000.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkata n Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pem erintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Pelayanan Administrasi Umum Dinas Ketahanan Pangan	160 Laporan	275.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	100 Persen 100 Persen			100 Persen	55.866.800,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkata n Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pem erintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Barang Milik Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan	100 Persen 100 Persen	61.453.480,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	12 Unit			5 Unit	55.866.800,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkata n Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pem erintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Barang Milik Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan	4 Unit	61.453.480,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan pada Perangkat Daerah</i>	100 Persen 100 Persen			100 Persen	347.659.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Jasa Penunjang Urusan Dinas Ketahanan Pangan	100 Persen 100 Persen	382.425.120,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	72 Laporan			24 Laporan	32.659.200,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Jasa Penunjang Urusan Dinas Ketahanan Pangan	24 Laporan	35.925.120,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	36 Laporan			12 Laporan	315.000.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Jasa Penunjang Urusan Dinas Ketahanan Pangan	12 Laporan	346.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik pada Perangkat Daerah</i>	100 Persen 100 Persen			100 Persen	239.026.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Barang Milik Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan	100 Persen 100 Persen	262.929.590,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	17 Unit			1 Unit	39.026.900,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Barang Milik Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan	17 Unit	42.929.590,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit			1 Unit	200.000.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Barang Milik Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan	1 Unit	220.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	<i>Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/ Jagung Sesuai Kebutuhan)</i>	775 %			775 %	1.000.000,00						775 %	1.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase ketersediaan infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan</i>	6 Unit			10 Persen	1.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Penciptaan struktur per ekonomian yang kokoh dan sumber daya manusia yang berkualitas dan inklusif	Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	2 Unit	1.100.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya														
			<i>Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia</i>	6 Unit			1 Unit	1.000.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Penciptaan struktur per ekonomian yang kokoh dan sumber daya manusia yang berkualitas dan inklusif	Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	2 Unit	1.100.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
3.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	<i>Tingkat Stabilitas Harga Pangan Utama bagi Masyarakat Angka Kecukupan Protein Angka Kecukupan Energi</i>	2130 Kkal/ Kapita/ Tahun ± 7,5 % 58,2 Gram Per Kapita/ Tahun 2130 Kkal/ Kapita/ Tahun ± 7,5 % 58,2 Gram Per Kapita/hari 58,2 Gram Per Kapita/ Tahun 2130 Kkal/ Kapita/ hari ± 7,5 %			± 9,5 % 57,15 Gram Per Kapita/ Tahun 2100 Kkal/ Kapita/ Tahun	606.000.000,00						2120 Kkal/ Kapita/ Tahun ± 8,5 % 57,55 Gram Per Kapita/ Tahun 2120 Kkal/ Kapita/ Tahun ± 8,5 % 57,55 Gram Per Kapita/hari 57,55 Gram Per Kapita/ Tahun 2120 Kkal/ Kapita/ hari ± 8,5 %	666.600.000,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	<i>Jumlah dokumen ketersediaan informasi penyediaan pangan pokok dan pangan lainnya</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	254.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Penciptaan struktur per ekonomian yang kokoh dan sumber daya manusia yang berkualitas dan inklusif	Ketersediaan Pangan Bagi Masyarakat	1 Dokumen	279.400.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan</i>	34 Unit			34 Unit	99.000.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Penciptaan struktur per ekonomian yang kokoh dan sumber daya manusia yang berkualitas dan inklusif	Ketersediaan Pangan Bagi Masyarakat	34 Unit	108.900.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota</i>	36 laporan			1 laporan	20.000.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Penciptaan struktur per ekonomian yang kokoh dan sumber daya manusia yang berkualitas dan inklusif	Ketersediaan Pangan Bagi Masyarakat	12 laporan	22.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota														
			<i>Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Penciptaan struktur per ekonomian yang kokoh dan sumber daya manusia yang berkualitas dan inklusif	Ketersediaan Pangan Bagi Masyarakat	1 Dokumen	71.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan														
			<i>Informasi Harga dan Pasokan Pangan</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Penciptaan struktur per ekonomian yang kokoh dan sumber daya manusia yang berkualitas dan inklusif	Ketersediaan Pangan Bagi Masyarakat	1 Dokumen	60.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	3 Dokumen			1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Penciptaan struktur per ekonomian yang kokoh dan sumber daya manusia yang berkualitas dan inklusif	Ketersediaan Pangan Bagi Masyarakat	1 Dokumen	16.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten	100 Ton			100 Persen	10.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Penciptaan struktur per ekonomian yang kokoh dan sumber daya manusia yang berkualitas dan inklusif	Cadangan Pangan bagi Masyarakat	100 Ton	11.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	15 Ton			1 Ton	10.000.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Penciptaan struktur per ekonomian yang kokoh dan sumber daya manusia yang berkualitas dan inklusif	Cadangan Pangan bagi Masyarakat	5 Ton	11.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Ketersediaan Dokumen Pencapaian Target Komsumsi Pangan Masyarakat Per Kapita/Tahun	1 Dokumen			100 Persen	342.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Penciptaan struktur per ekonomian yang kokoh dan sumber daya manusia yang berkualitas dan inklusif	Konsumsi Pangan Masyarakat	1 Dokumen	376.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun														
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	3 Dokumen			1 Dokumen	22.000.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Penciptaan struktur per ekonomian yang kokoh dan sumber daya manusia yang berkualitas dan inklusif	Konsumsi Pangan Masyarakat	1 Dokumen	24.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>	36 Laporan			40 Laporan	320.000.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Penciptaan struktur per ekonomian yang kokoh dan sumber daya manusia yang berkualitas dan inklusif	Konsumsi Pangan Masyarakat	12 Laporan	352.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
4.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	<i>Persentase Daerah Rawan Pangan di Wilayah Kab/Kota yang Ditangani</i>	95 %			95 %	35.000.000,00						95 %	38.500.000,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	<i>Persentase Ketersediaan Dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan</i>	3 Dokumen			100 Persen	20.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Penciptaan struktur per ekonomian yang kokoh dan sumber daya manusia yang berkualitas dan inklusif	Peta Daerah Rawan Pangan	1 Dokumen	22.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan														
			<i>Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Penciptaan struktur per ekonomian yang kokoh dan sumber daya manusia yang berkualitas dan inklusif	Peta Daerah Rawan Pangan	1 Dokumen	22.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Persentase kerawanan pangan yang tertangani</i>	20 Paket			75 Persen	15.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Penciptaan struktur per ekonomian yang kokoh dan sumber daya manusia yang berkualitas dan inklusif	Masyarakat Rawan Pangan	20 Paket	16.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Penciptaan struktur per ekonomian yang kokoh dan sumber daya manusia yang berkualitas dan inklusif	Masyarakat Rawan Pangan	1 Dokumen	5.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Penciptaan struktur per ekonomian yang kokoh dan sumber daya manusia yang berkualitas dan inklusif	Masyarakat Rawan Pangan	1 Dokumen	11.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
5.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	<i>Persentase Ketersediaan Pangan yang Aman Dikomsumsi oleh Masyarakat</i>	100 %			100 %	143.333.290,00						100 %	157.666.619,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar</i>	15 Dokumen			100 Persen	143.333.290,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Penciptaan struktur per ekonomian yang kokoh dan sumber daya manusia yang berkualitas dan inklusif	Keamanan Pangan bagi Masyarakat	5 Dokumen	157.666.619,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota</i>	3 Dokumen			12 Dokumen	103.333.290,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Penciptaan struktur per ekonomian yang kokoh dan sumber daya manusia yang berkualitas dan inklusif	Keamanan Pangan bagi Masyarakat	1 Dokumen	113.666.619,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	3 Dokuman			12 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Penciptaan struktur per ekonomian yang kokoh dan sumber daya manusia yang berkualitas dan inklusif	Keamanan Pangan bagi Masyarakat	1 Dokuman	44.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	J U M L A H							4.851.654.864,00							5.336.820.350,00	

Sumber Data : Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Tahun 2024-2026

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 disusun melalui proses tahapan yang cukup panjang mulai dari musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan sampai musrenbang Tk. Kabupaten dalam rangka memperoleh tingkat keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Dinas Ketahanan Pangan memperhatikan konsistensi antara Renja Tahun 2024 dengan alokasi anggaran dalam RAPBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2024.

Olehnya itu, diperlukan perencanaan kinerja yang memuat langkah-langkah strategis yang sistematis, terukur, terencana dan berkesinambungan dari tahun ke tahun. Rencana kerja perangkat daerah merupakan salah satu dokumen perencanaan strategis yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah. Rencana Kinerja ini dimaksudkan agar perangkat daerah dapat merumuskan dan menyesuaikan langkah-langkah strategis dalam bentuk program dan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk masa 1 (satu) tahun kedepan sehingga proses pencapaian tujuan dan sasaran dapat diwujudkan dengan orientasi pada hasil yang efektif, efisien dan ekonomis serta tercipta kesetaraan dalam pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan program-program pembangunan di daerah, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di masing-masing bidang tahun 2024 yang didanai oleh APBD. Untuk itu dinas berkewajiban menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program pembangunan setiap triwulan kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten Bone. Selanjutnya, keseluruhan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut menjadi bahan penyusunan RKPD Tahun berikutnya. Selain

hal tersebut jika dalam proses pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2024 diperlukan perubahan dan revisi, maka akan dilaksanakan dengan memperhatikan aturan yang berlaku.

Watampone, Juli 2023
Kepala Dinas Ketahanan



Ir. MUHAMMAD ANGKASA, M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19671223 199303 1 002